

# **PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN AUDITOR INSPEKTORAT TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE)**

**Mulia Andirfa dan Sri Wahyuni**

Program Studi Akuntansi  
STIE Lhokseumawe

## **ABSTRACT**

*This research was intended to know The Influence Of Personal Background And Auditor Budget Knowledge For Region Financial Control. The independent variable in this study is personal background and Auditor Budget Knowledge. Dependent variable in this study is Region Financial Control. This study used a sample of auditor in the Inspektorat Lhokseumawe. Data were collected using total sampling, and tested using descriptive statistical analysis, test data quality, classic assumption test, multiple regression analysis, F test, test the coefficient of determination and t test (partial). The test results show personal background (gender, age, and the long time work) with partial test show no effect on the region financial control, and personal background (graduate and spesific graduate) show is positive effect on the region financial control. The test results with the auditor knowledge about budgets is positive effect on the region financial control. The results with the simultan test show is personal background and the auditor knowledge about budgets is positive effect on the region financial control.*

**Keywords :** *Personal Background, Auditor Budget Knowledge and Region Financial Control*

## **A. Latar Belakang Penelitian**

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang

sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winarna dan Murni (2007). *Personal background* meliputi beberapa dimensi, yaitu: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan. Menurut penulis *personal background* adalah latar belakang diri yang dimiliki seseorang dan melekat pada orang tersebut, latar belakang tersebut dapat berupa jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

Pramono (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) mengemukakan bahwa Inspektorat akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif, serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap auditor Inspektorat mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal anggaran, pengawasan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui tentang anggaran, diharapkan para auditor Inspektorat dapat mendekteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran secara individu terhadap tahap-tahap pengawasan keuangan daerah hanya berpengaruh pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disusun, dalam pengawasan keuangan daerah dilakukan secara langsung. Inspektorat dapat mengetahui rencana anggaran yang diajukan apakah relevan atau tidak. Pada tahap pertanggungjawaban pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran secara langsung dapat mendeteksi adanya suatu kebocoran dan pemborosan anggaran yang terjadi dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban, laporan perhitungan APBD, dan nota perhitungan APBD.

Penilaian pada pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa auditor Inspektorat masih lemah dalam mengelola keuangannya. Terlalu banyak kejanggalan arus anggaran baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran menjadi salah satu indikator yang dinilai menjadi penyebab buruknya sistem keuangan tersebut.

Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan pada tingkat administrasi yang tidak menutup kemungkinan salah. Padahal, Inspektorat seharusnya mampu membaca dan menganalisa alur anggaran dan mencocokkan antara arus anggaran masuk dan arus anggaran keluar. Pengawasan keuangan daerah dalam era otonomi daerah ini masih mengalami banyak permasalahan. Permasalahan tersebut baik dari kelembagaan aparat pengawasannya yang belum dapat bekerja secara transparan, bertanggungjawab, sinergi, efisien dan efektif.

Keberadaan Inspektorat tentunya sangat penting dalam pengawasan keuangan daerah di Kota Lhokseumawe. Auditor Inspektorat berasal dari *personal background* yang berbeda. Selain itu, tingkat pengetahuan mereka belum tentu sama. Pada dasarnya, pengetahuan berhubungan dengan tingkat pendidikan dan kemauan serta keseriusan dalam memahami segala sesuatu, terutama yang berkaitan dengan anggaran.

## **B. Landasan Teori**

### **1. *Personal Background***

*Personal background* merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

*Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber

daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winarna dan Murni (2007).

Perilaku pengawasan yang dilakukan aparatur pemerintah dipengaruhi oleh berbagai dimensi *personal background* yang merupakan bahan dalam pertimbangan pengawasannya. Variabel *personal background* pada penelitian ini meliputi beberapa dimensi, yaitu:

## **2. Pengertian Pengetahuan Auditor Inspektorat tentang Anggaran**

Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Nisa dan Irmadariyani (2016), pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Menurut Salim (2006:35) dalam Handoyo dan Trisnowati (2011), mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Sementara Winarna dan Murni (2007) mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran.

## **3. Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral

dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Menurut Baswir dalam Halim (2007:307-308), bahwa berdasarkan pengertiannya pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan berdasarkan obyeknya, pengawasan APBN/APBD, pengawasan BUMN/BUMD, maupun pengawasan barang-barang milik negara dan daerah lainnya.

1. Pengawasan intern, dapat dibedakan menjadi dua :
  - a. Pengawasan intern dalam arti sempit, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam arti sempit ini adalah Inspektorat Jenderal Departemen (IRJENDEP), Inspektorat Wilayah Propinsi (ITWILPROP), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (ITWILKAB), Inspektorat Wilayah Daerah Kota (ITWILKOT).
  - b. Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasi pemerintahan. Fungsi pengawasan

dalam arti luas ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Pembangunan (IRJENDBANG).

2. Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan internal dilakukan oleh BPKP, disamping itu dikenal pula pengawasan legislatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPRD tingkat I dan tingkat II terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan.

### C. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berasal dari kuesioner yang diantarkan langsung kepada responden yaitu auditor Inspektorat Kota Lhokseumawe. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan kuesioner yang berisi pertanyaan/

pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan pada orang lain (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Inspektorat Kota Lhokseumawe yang bertugas melakukan pengawasan keuangan daerah, yang berjumlah 36 orang.

### D. Hasil Penelitian

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung (nilai *corrected item total correlation* pada *output cronbach alpha*) dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$  ( $n$  adalah jumlah sampel). Dengan jumlah sampel ( $n$ ) adalah 36 dan tingkat signifikansi 0,05. Maka  $r$  tabel pada penelitian ini adalah:  $r(0,05; 36 - 2) = 0,283$

Jika  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel dan berkorelasi positif maka butir atau pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata lain item pertanyaan dikatakan valid apabila skor item pertanyaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan skor total variabel.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Item</b>	<b><i>Item-total Correlation</i></b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,804	0,283	Valid
2	0,427	0,283	Valid
3	0,366	0,283	Valid
4	0,291	0,283	Valid
5	0,315	0,283	Valid
6	0,479	0,283	Valid
7	0,804	0,283	Valid
8	0,814	0,283	Valid
9	0,449	0,283	Valid
10	0,324	0,283	Valid
11	0,374	0,283	Valid
12	0,383	0,283	Valid
13	0,338	0,283	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh *item* pertanyaan dalam kuesioner mempunyai *item-total correlation* > 0,283 maka pertanyaan tersebut valid.

## **2. Uji Realibilitas**

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama.

Pengukuran reliabel dalam penelitian ini adalah *one shot*. *One shot* atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh *item*/pertanyaan yang dipergunakan pada penelitian ini akan menggunakan formula *cronbach alpha* (koefisien *alpha cronbach*), suatu konstruk atau variabel dianggap reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,70.

Perhitungan nilai koefisien reliabilitas untuk instrumen penelitian yang digunakan, diperoleh hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Item	Cronbach Alfa	0,70	Keterangan
<i>Personal Background</i> Pengetahuan Auditor Tentang Anggaran Pengawasan Keuangan Daerah	0,827	0,70	Reliabel
	0,829	0,70	Reliabel
	0,849	0,70	Reliabel

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian reliabilitas instrumen penelitian, karena diperoleh nilai koefisien reliabilitas > 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

**3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linier

berganda untuk menjawab analisis pengaruh *personal background* dan pengetahuan aparatur inspektorat tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh keterikatan antara  $X_1$  dengan  $Y$ ,  $X_2$  dengan  $Y$ , yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	33,655
<i>Personal background</i>	1,669
Pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran	0,186

Sumber: Data diolah 2017

Dari perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS for windows maka didapat hasil sebagai berikut :

$$Y = 33,655 + 1,669X_1 + 0,186X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan :

- Konstanta dalam persamaan regresi tersebut yaitu 33,655. Artinya, jika variabel *personal*

*background* dan pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran bernilai 0, maka variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 33,655.

- Nilai koefisien regresi variabel *personal background* sebesar 1,669. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel *personal background* sebesar 1, maka nilai variabel pengawasan keuangan

daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,669.

- Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran sebesar 0,186. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran sebesar 1 sedangkan nilai variabel lain tetap, maka nilai variabel pengawasan keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,186.

#### 4. Hasil Pengujian Parsial (*Uji t*)

- Variabel personal background (jenis kelamin, umur, pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman kerja) merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
- Untuk jenis kelamin probabilitas kesalahan sebesar 0,383 diatas 0,05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,886 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,690. Dengan demikian  $t_{hitung}$  tidak berpengaruh, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang artinya tidak terdapat pengaruh antara jenis kelamin terhadap pengawasan keuangan daerah.
- Untuk umur probabilitas kesalahan sebesar 0,098 diatas 0,05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,712 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,690. Dengan demikian  $t_{hitung}$  tidak berpengaruh, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang artinya tidak terdapat pengaruh antara umur terhadap pengawasan keuangan daerah.
- Untuk pendidikan probabilitas kesalahan sebesar 0,027 dibawah 0,05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,324 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,690. Dengan demikian  $t_{hitung}$  berpengaruh, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh antara pendidikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengaruhnya positif sebesar 0,406 artinya jika pendidikan makin tinggi maka pengawasan semakin baik.
- Untuk bidang pendidikan probabilitas kesalahan sebesar 0,002 dibawah 0,05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,450 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,690. Dengan demikian  $t_{hitung}$  berpengaruh, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh antara bidang pendidikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengaruhnya positif sebesar 0,623 artinya jika bidang pendidikan makin sesuai maka pengawasan semakin baik.
- Untuk pengalaman kerja probabilitas kesalahan sebesar 0,153 diatas 0,05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,467 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,690. Dengan demikian  $t_{hitung}$  tidak berpengaruh, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang artinya tidak terdapat pengaruh antara pengalaman kerja terhadap pengawasan keuangan daerah.

- Variabel pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Probabilitas kesalahan sebesar 0,004 dibawah 0,05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,134 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,690. Dengan demikian  $t_{hitung}$  berpengaruh, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat

pengaruh antara pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengaruhnya positif sebesar 0,566 artinya jika pengetahuan tentang anggaran makin tinggi maka pengawasan keuangan daerah makin baik.

**5. Hasil Pengujian (Uji F)**

Hasil analisis regresi berganda simultan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9**  
**ANOVA**

Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	12,317	6	2,053	3,453	0,011
<i>Residual</i>	17,239	29	0,594		
Total	29,556	35			

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan  $df_1 = 6$  dan  $df_2 = 29$  maka tabel didapat  $F(6; 29) = 2,432$  (lihat lampiran 5). Dalam perhitungan diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu  $3,453 > 2,432$  sehingga berpengaruh. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,011 yaitu  $< 0,05$  maka

keputusannya juga berpengaruh, yang berarti hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara *personal background* dan pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kota Lhokseumawe.

**6. Koefisien Determinasi (R2)**

**Tabel 4.10**  
**Model Summary**

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,646	0,417	0,296	0,771	1,055

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4.10 diatas, dapat terlihat *adjusted R square* sebesar 0,296 yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu *personal background* (jenis kelamin, umur, pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman kerja) dan pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran sebesar 29,6%, sisanya yaitu 70,4% pengawasan keuangan daerah dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh *personal background* dan pengetahuan audit inspektorat tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah , maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

- *Personal background* (jenis kelamin, usia, dan masa kerja) tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan *personal background* (pendidikan dan bidang pendidikan) berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti jika pendidikan semakin tinggi dan bidang pendidikan semakin sesuai maka pengawasan keuangan daerah semakin baik.
- Pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti jika pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran semakin tinggi maka pengawasan keuangan daerah semakin baik.

- *Personal background* dan pengetahuan auditor Inspektorat tentang anggaran berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah

### F. Daftar Pustaka

- Azwar (2007). Sikap Manusia dan Pengukurannya. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoyo, S. dan Trisnowati, J. (2011). Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (Studi Kasus pada DPRD Se-Eks Karisidenan Surakarta). Jurnal Ilmiah, Vol. 12 Hal:97-132, Yogyakarta.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriani, R. (2002). Pengaruh Pengetahuan dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bengkulu). Jurnal Akuntansi, Vol. 24 Hal:120-144, Yogyakarta.
- Jaweng, R.E. (2009). "Politik Pelayanan Publik" Harian Kompas, Kamis 11 Juni 2009.
- Mulyadi (2001). Akuntansi Manajemen : Konsep. Manfaat dan Rekayasa. Edisi Kelim, STIE YKPN, Yogyakarta.

- Mardiasmo (2004). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Munandar, M. (2001). Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi Pertama, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nisa, C. dan Irmadariyani, R (2016). Pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, (Studi pada DPRD Kabupaten Banyuwangi). Artikel ilmiah mahasiswa 2016, Jember.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 (2007). Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 5, ayat (1) dan ayat (2). Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 (2007). Tentang Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pasal 4, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 (2005). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1, Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 (2006). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 15 ayat (3). Republik Indonesia, Jakarta.
- Qanun Nomor 4 (2009). Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Kota Lhokseumawe. Pasal 73, Daerah Istimewa Aceh. Lhokseumawe.
- Sopannah dan Mardiasmo (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 Hal: 111-153, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 (2003). Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 1. Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia, Jakarta.
- Winarna, J. dan Murni, S. (2007). Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (Studi Kasus pada DPRD Karisidenan Surakarta dan Yogyakarta). Jurnal Penelitian Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Sebelas Maret, Yogyakarta.
- Wibowo, S.A. (2012). Pengaruh *Personal Background*, *Political Culture* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (Studi pada DPRD Karisidenan Cirebon). Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol. 13 No. 1, Hal: 44-52, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Witono, B. (2003). Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 Hal: 151-168. •